

PENDAMPINGAN ASPEK MANAJERIAL / KELEMBAGAAN KOPERASI UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS USAHA PADA KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL

Aji Erlangga Martawireja¹, Taryana²,
Rizky Maulana Pribadi³

¹⁾ Akuntansi, ITB Ahmad Dahlan
Jakarta

²⁾ Akuntansi, ITB Ahmad Dahlan
Jakarta

³⁾ Akuntansi, ITB Ahmad Dahlan
Jakarta

Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author

Email : mtaryana12@gmail.com

Abstrak

Penurunan kinerja keuangan dan peningkatan pembiayaan bermasalah merupakan masalah utama yang dihadapi hampir semua lembaga keuangan akibat pandemi covid-19. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada salah satu koperasi syariah nasional yang mengalami penurunan kinerja keuangan akibat pandemi covid-19. Objek pada kegiatan ini merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang mendapatkan bantuan dana dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan beberapa tahap kegiatan. Fokus utamanya dengan memberikan pelatihan penilaian kesehatan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 07/Per/Dep/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa objek kegiatan mendapatkan predikat sehat, namun predikat tersebut belum mencerminkan kondisi penurunan kinerja keuangan dan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu perlu adanya manajemen pembiayaan untuk mengelola pembiayaan yang telah disalurkan, sehingga kualitas aktiva produktif tidak mengalami penurunan. Koperasi syariah bisa melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan berpedoman kepada POJK No. 11/POJK.03/2020

Kata kunci: KSPPS, BMT, PEN, Penilaian Kesehatan, Restrukturisasi Pembiayaan

Abstract

Declining financial performance and increasing non-performing financing are the main problems faced by almost all financial institutions due to the COVID-19 pandemic. This program aims to provide assistance to one of the national sharia cooperatives in decline financial performance situation due to the COVID-19 pandemic. The object of this activity is sharia financing cooperative that receives financial support from The Channeling of Rolling Funds Agency (LPDB) which is part of the National Economic Recovery (PEN) program. The implemetation program by online with several stages. The main focus is on providing by giving assessment training based on the Deputy for Supervision Regulation No. 07/Per/Dep/2016 concerning guidelines for evaluating the financial performance of sharia financing cooperatives. The results of the assessment show that the object of activity has been good performnace, but the categories of good performance does not reflect the condition of declining financial performance and increasing number of non-performing financing. Therefore, there are need for financing management to manage the disbursed financing, so that the quality of earning assets will be stabilies. Sharia cooperatives can restructure financing by referring to POJK No. 11/POJK.03/2020

Keywords: KSPPS, BMT, PEN, Financial Performance, Restructured financing

PENDAHULUAN

Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin Dalam acara BMT Summit 2020 tanggal 16 November 2020 menyatakan bahwa pada saat pandemi Covid 19 merupakan masa yang tepat untuk memberdayakan UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang terdampak coronavirus. Pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp. 695 triliun dalam rangka memulihkan ekonomi nasional, 230,21 triliun diantaranya dialokasikan untuk perlindungan sosial. Sementara, sebanyak Rp116,31 triliun dialokasikan untuk memberikan dukungan kepada UMKM (Kementerian Keuangan, 2021). Dengan demikian 50% dari dana PEN dialokasikan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan UMKM. Prioritas bantuan kepada UMKM dalam rangka meningkatkan ekonomi sebagai dampak pandemic Covid 19. Selain itu pemerintah juga fokus terhadap ekonomi dan keuangan Syariah melalui pemanfaatan potensi penggunaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Mal Wattamwil (BMT) dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha KJKS atau BMT dalam kegiatan penyaluran pembiayaan kepada UMKM, BMT juga harus terus meningkatkan kemampuan usaha diseluruh aspek operasionalnya, baik dari sisi aspek manajerial, aspek kapasitas pengembangan usaha, pendanaan atau permodalan, aspek penyaluran pembiayaan, aspek pengelolaan risiko, dan aspek-aspek lainnya. Demikian halnya bagi UMKM anggota KJKS BMT harus terus meningkatkan kapasitas usaha yang berdampak kepada peningkatan laba usaha dan kemampuan untuk membayar kewajiban angsuran kepada BMT. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota KJKS BMT harus dilakukan secara selektif dan benar-benar memenuhi seluruh persyaratan administratif dan menganalisa kemampuan bayar sehingga dapat memperkecil potensi nasabah bermasalah atau gagal bayar (non performing financing/NPF).

KSPPS BMT Bina Umat Mandiri merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang menyediakan berbagai jenis produk pendanaan maupun pembiayaan Syariah yang pertama berdiri di Kota Tegal propinsi Jawa Tengah. Kontribusi dan peran serta BMT dalam membangun ekonomi negeri akan mengalirkan keberkahan bagi umat, ditunjukkan dengan keberpihakan pada penyaluran pembiayaan Syariah bagi UMKM terutama di wilayah Tegal dan Propinsi Jawa Tengah. Pada akhir tahun 2019 (tutup buku 2019), tercatat aset koperasi telah mencapai Rp.70,9 Milyar dengan portofolio penyaluran pembiayaan sebesar

Rp.43,8 Milyar. Pada tahun 2019, KSPPS BMT Bina Umat Mandiri juga telah menjadi Koperasi Nasional. KSPPS BMT Bina Umat Mandiri adalah salah satu Koperasi Syariah yang terseleksi dan menerima bantuan dari Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) tahun 2019 dari total 84 koperasi dengan rincian koperasi konvensional sebanyak 43 koperasi dan koperasi Syariah sebanyak 41 koperasi. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dalam menganalisis kesehatan Koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 7 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Hal itu bertujuan sebagai mitigasi risiko yang ditimbulkan akibat adanya wabah covid 19 yang berdampak pada penurunan kinerja dan peningkatan kredit macet pada KSPPS BMT BUM.

MANFAAT

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada KJKS BMT Bina Umat Mandiri dan anggotanya dalam mitigasi risiko penurunan kinerja keuangan akibat adanya wabah covid 19. Sehingga KJKS BMT Bina Umat Mandiri mampu mengambil keputusan berdasarkan review kesehatan Koperasi. Selain itu dengan adanya pengabdian ini KJKS BMT Bina Umat Mandiri diharapkan mampu melakukan pengelolaan manajemen pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas usahanya

METODE

Metode dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan tindakan langsung (Rose & Grosvenor, 2013), Dengan tahapan yang terdiri dari : 1) Penggalan informasi serta analisis situasi yang dibutuhkan. 2) Bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan LPDB dalam membedah kesehatan koperasi syariah. 3) Penilaian kesehatan KSPPS dengan membandingkan laporan keuangan tiga tahun terakhir. 4) Kujungan kepada anggota Koperasi.



Gambar 1. Tahapan Pengabdian

PEMBAHASAN

Penggalan Informasi yang dibutuhkan

Pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan penggalan informasi yang paling dibutuhkan oleh

KSPPS BUM yang dilaksanakan secara daring tanggal 10 Maret 2021. Berikut hasil penggalan informasi yang dibutuhkan.

a. Direktur Utama

Menurut direktur utama, kondisi KSPPS BMT BUM saat itu adalah : 1) Penurunan keuangan pada masa pandemi 20%, 2) Kenaikan Kredit macet, 3) Kurangnya pemahaman tentang Budaya Kerja yang baik, 3) Keanggotaan 50% pasar tradisional, dan 4) pemahaman koperasi dan ekonomi Syariah masih kurang.

b. Manager divisi maal.

Menurut Bapak Ilnun, Kelembagaan KSPPS BMT BUM seperti logo, keunikan, pembiayaan belum menonjol dan kurangnya pemahaman Pengelola bahwa BMT BUM adalah salah satu lembaga lembaga dakwah.

c. Pengawas Koperasi

Sementara menurut pengawas Koperasi, kelemahan KSPPS BMT BUM adalah kurangnya Pemetaan anggota terutama pangsa pasar milenial.

Dari hasil penggalan informasi, Pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan kepada penilaian kesehatan koperasi mengingat KSPPS BMT BUM mendapatkan pinjaman dana dari LPDB sementara kondisi kinerja keuangan BMT sedang menurun akibat adanya wabah covid 19.

Pemberian Materi Kesehatan Koperasi Syariah

Tahapan Pengabdian kepada masyarakat selanjutnya adalah pemberian materi terkait tingkat kesehatan koperasi. Pemberian materi ini tidak terlepas dari hasil penggalan informasi yang paling dibutuhkan KSPPS BMT BUM pada tahapan awal pengabdian. Agar materi yang diberikan memiliki tingkat kedalaman dan bobot yang cukup berkualitas. Kami bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, OJK serta LPDB dalam membedah tingkat kesehatan koperasi syariah. Pemberian materi ini dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 secara daring.

Tabel 1. Daftar Hadir Pemberian Materi Penilaian Kesehatan KSPPS

No	Perwakilan	Nama
1	Kantor Staf Presiden	Bella Scholastica, Puti Shania
2	Kemenkop UKM	Dandy, Herbas, Kun Ismandari, Tony Susanto dan

Yulianto Eko Putro

3	Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	Jarot W. Wibowo, E. Prianto, Yones, Saefudin Zuhri
4	ITB Ahmad Dahlan Jakarta	Aji Erlangga, Taryana dan Rizky Maulana P.
5	OJK	Nuraini Yuanita
6	KSPPS BMT BUM	Erni Ratnani. Yeni dan Anggit

Historis Pelaksanaan Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan Koperasi syariah berawal pada tahun 2015 dengan terbentuknya deputi bidang koperasi, dimana koperasi simpan pinjam dilaksanakan pada bidang pengawas. Selanjutnya pada tahun 2016 terdapat sebuah peraturan yang menjadi pedoman dalam menilai kesehatan koperasi yakni Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 7 Tahun 2016 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dan pada bulan Oktober 2020 Terbit Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Penilaian kesehatan mengalami pergeseran, penilaian kesehatan menjadi pemeriksaan kesehatan. awalnya hanya menilai tingkat kesehatan, saat ini variabel sehat dan cukup sehat menjadi variabel penting dalam pemeriksaan. Landasan hukum penilaian kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi

- e. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah, 2016)

Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah

Tahapan selanjutnya dari pegabdian ini adalah pelatihan penilaian kesehatan KSPPS. Penilaian kesehatan ini berpedoman kepada Perdep No. 07 tahun 2016 tentang penilaian kesehatan koperasi syariah. Aspek yang dinilai dalam kesehatan koperasi syariah terdiri dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif terdiri dari aspek kualitas aktiva produktif, likuiditas, permodalan, efisiensi, jati diri koperasi, serta kemandirian dan pertumbuhan. Sementara aspek kualitatif terdiri dari aspek kepatuhan prinsip syariah dan manajemen (Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, 2016). Selanjutnya data kuantitatif diperoleh dari data laporan keuangan KSPPS BMT BUM selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2018 s/d 2020. Sementara data kualitatif diperoleh dengan cara wawancara pengurus KSPPS. Sebagai materi tambahan pembina juga memberikan materi terkait restrukturisasi sebagai relaksasi pembiayaan pada KSPPS BMT BUM. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021. Ringkasan dari hasil penilaian KSPPS tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penilaian Kesehatan KSPPS BMT BUM tahun 2020 Berdasarkan Perdep No. 07 tahun 2016

Aspek Penilaian dan Indikatornya	BMT X 2020	
	Rasio BMT	Bobot nilai
Permodalan		6,25
a. Rasio modal sendiri terhadap total aset	6,67%	1,25
b. CAR	8,46%	5,00
Kualitas Aktiva Produktif		14,50
a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	8,27%	7,50
b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	8,27%	5,00
c. Rasio PPAP	39,68%	2,00
Manajemen		13,80
a. Manajemen Umum	3	3
b. Kelembagaan	3	3
c. Manajemen Permodalan	1,8	1,8
d. Manajemen Aktiva	3	3
e. Manajemen Likuiditas	3	3
Efisiensi		6,50
a. Rasio Biaya Operasional	89,83%	2,00

Pelayanan Terhadap Partisipasi		
b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	6,94%	4,00
c. Rasio Efisiensi Pelayanan	6,02%	1,50
Likuiditas		10,00
a. Cash Rasio	39,87%	7,50
b. FDR	64,15%	2,50
Jatidiri Koperasi		10,00
a. Rasio Partisipasi Bruto	100,00%	5,00
b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	47,08%	5,00
Kemandirian dan Pertumbuhan		8,50
a. Rentabilitas Aset	16,94%	3,00
b. Rentabilitas Ekuitas	6,66%	1,50
c. Kemandirian Operasional Pelayanan	273,76%	4,00
Kepatuhan Prinsip Syariah	10,00%	10,00
Total Skor		80,55
Predikat		Sehat

Sumber: Perdep No. 07 th 2016 dan hasil olah data lap. keuangan KSPPS BMT BUM 2020

Hasil penilaian kesehatan KSPPS BMT BUM menunjukkan bahwa KSPPS termasuk kategori sehat. Namun jika dianalisis lebih lanjut, predikat "sehat" pada KSPPS BMT BUM belum mencerminkan penurunan kinerja keuangan akibat dampak covid 19. Tabel 3. Menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah rekening pembiayaan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 16% dari 3.159 rekening pada 2019 menjadi 2.666 pada tahun 2020.

Tabel 3. Jumlah Rekening Pembiayaan

Kualitas Aktiva	Jumlah Rekening Pembiayaan		
	2018	2019	2020
Lancar	2.493	3.159	2.666
Kurang Lancar	92	79	150
Diragukan	78	60	87
Macet	156	211	402
Total	2.819	3.509	3.305

Sumber: hasil olah data lap. keuangan KSPPS BMT BUM

Penurunan jumlah rekening pembiayaan pada KSPPS BMT BUM tidak disertai dengan perbaikan kualitas aktiva produktifnya. Tabel 4. Mengambarkan terjadi kenaikan Outstanding (OS) pembiayaan bermasalah baik kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk OS pembiayaan kurang lancar naik 45%, diragukan naik 14% dan yang paling mengkhawatirkan adalah OS pembiayaan macet naik hampir 50 % dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Tabel 4. Outstanding Pembiayaan

Kualitas Aktiva	OS Pembiayaan (dalam Jutaan Rp)		
	2018	2019	2020
Lancar	33.106	41.751	39.733
Kurang Lancar	260	753	1.362
Diragukan	739	608	710

Macet	801	764	1.510
Total	34.907	43.878	43.316

Sumber: hasil olah data lap. keuangan KSPPS BMT BUM

Selanjutnya tabel 5. Menggambarkan terjadi kenaikan nonferming Financing dari 4.85% tahun 2019 menjadi 8.27% pada tahun 2020.

Tabel 5. Non Performing Financing

Kualitas Aktiva	Non Performing Financing		
	2018	2019	2020
Kurang Lancar	0,75%	1,72%	3,15%
Diragukan	2,12%	1,39%	1,64%
Macet	2,30%	1,74%	3,49%
Total	5,16%	4,85%	8,27%

Sumber: hasil olah data lap. keuangan KSPPS BMT BUM

Penurunan kualitas aktiva ini akan sangat mengganggu kinerja keuangan KSPPS. Pembina menyarankan kepada KSPPS, perlunya pengelolaan manajemen risiko kredit. Untuk merespon hal tersebut KSPPS mengantisipasi dengan merekrut karyawan sebagai kolektor yang bertugas murunkan kualitas aktiva produktif yang tidak lancar

Relaksasi Pembiayaan (POJK No.11/POJK.03/2020)

UMKM sebagai aset utama BMT mengalami dampak yang sangat signifikan akibat pandemi Covid 19, karena arus kas BMT bergantung kepada likuiditas harian nasabahnya. OJK telah mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 yang mengatur restrukturisasi kredit, namun aturan tersebut kusus bagi perbankan dan leasing bukan BMT. Aturan yang diterapkan pada masa pandemi 19 seperti penerapan *physical distancing* mengakibatkan *repayment rate* BMT mengalami penurunan tajam. Masalah utama Lembaga Keuangan baik konvensional maupun Syariah di masa pandemi adalah terganggunya kinerja dan kemampuan debitur, termasuk UMKM dalam memenuhi seluruh kewajiban kreditnya sehingga berpotensi mengurangi kinerja keuangan lembaga keuangan tersebut. Sehingga untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan serta mendukung pertumbuhan perekonomian, maka dibutuhkan kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomis akibat COVID-19.

OJK mengeluarkan peraturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran coronavirus. Dalam POJK tersebut dinyatakan bahwa UMKM merupakan bagian dari nasabah yang mengalami penurunan dalam membayar kewajiban pada bank dan akan mendapatkan perlakuan khusus. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Karena hal tersebut, KSPPS dapat merestrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak COVID-19. Program restrukturisasi pembiayaan umumnya telah banyak diterapkan dalam dunia perbankan syariah. Dimana, bank yang menyalurkan pembiayaan memiliki program restrukturisasi yang diatur pada kebijakan pembiayaan pada masing-masing bank.

Tujuan dari dilakukannya restrukturisasi pembiayaan adalah untuk memberikan relaksasi pembiayaan kepada usaha yang terdampak melalui berbagai skema restrukturisasi seperti, memperpanjang waktu pembiayaan, pengurangan atau penurunan margin, pengurangan tunggakan baik pokok maupun margin, penambahan fasilitas pembiayaan yang diberikan pada pelaku usaha dan konversi obligasi perusahaan menjadi saham (Pernando, 2020).

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK No. 11/POJK.03/2020, Para debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 dan mengalami penurunan dalam membayar kewajiban pada KSPPS BMT BUM maka dapat merestrukturisasi pembiayaan yang bertanggung, dengan cara:

- Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- Penurunan margin
- Pengurangan tunggakan pokok dan atau margin
- Penambahan fasilitas pembiayaan
- Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

KESIMPULAN

Dampak dari pandemi virus corona disease 19 sangat mempengaruhi segala aspek terutama sektor keuangan. KSPPS BMT BUM merupakan salah satu koperasi syariah nasional yang terdampak covid 19. Jumlah rekening pembiayaan mengalami penurunan namun jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan. NPF KSPPS BMT BUM tahun 2020 mencapai 8%. BMT sebagai lembaga keuangan berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) harus tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya sehingga risiko pembiayaan bisa dimitigasi sejak dini. Selanjutnya BMT disarankan untuk menjaga hubungan baik dengan para anggotanya dengan tetap menjaga komunikasi sehingga kualitas aktiva yang telah dimiliki tidak menurun.

Implikasi dari kegiatan ini KSPPS diharapkan bisa memitigasi Risiko sejak dini dengan meningkatkan manajemen pembiayaan.

PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. (2021). *Warta Fiskal : Ekonomi Mulai Pulih*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. (2016). *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No/ 07/Per/Dep/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi*.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah. (2016). *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No/ 06/Per/Dep/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- Pernando, A. (2020, April). *Restrukturisasi Kredit, Ini 4 Hal yang Mesti Dipertimbangkan Sebelum Minta Keringanan Cicilan*.
<https://finansial.bisnis.com/read/20200414/90/1227121/restrukturisasi-kredit-ini-4-hal-yang-mesti-dipertimbangkan-sebelum-minta-keringanan-cicilan>.
- Rose, R., & Grosvenor, I. (2013). *Action reseach in Doing Research in Special Education : Idea Into Practise*. doi: 10.4324/9781315069173-8.